



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 56 Tahun 2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 - 2018

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Tangerang adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 - 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Walikota adalah Walikota Tangerang;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang;
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2014-2018.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 19 Nopember 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 19 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 56

LAMPIRAN II :
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2014 – 2018

**FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
(...nama SKPD...) KOTA TANGERANG**

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...nama SKPD...) KOTA TANGERANG
NOMOR : /.....
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(...nama SKPD....) KOTA TANGERANG

KEPALA (...nama SKPD....) KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (...nama SKPD...);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (...nama SKPD...) tentang Indikator Kinerja Utama (...nama SKPD...);

Mengingat : 1.

2.

3. Dst.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (...nama SKPD...) Kota Tangerang, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan

oleh (...nama SKPD...) Kota Tangerang dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...nama SKPD...) Kota Tangerang Tahun 2014-2018.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tangerang dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...nama SKPD...) Kota Tangerang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 12.....2014
KEPALA (...nama SKPD.....)
Kota Tangerang,

(Nama Lengkap dan Titel)
(Pangkat / Golongan)
(NIP.)

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

LAMPIRAN I :
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR ..56..... TAHUN ..2014.....
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN 2014 – 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA TANGERANG
TAHUN 2014 – 2018

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
Misi 1: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional						
1	1	1	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem pendaftaran, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan penyelesaian konflik pertanahan	1 Tingkat pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah	Dinas Tata Kota	Perbandingan antara jumlah fasilitasi pengadaan tanah yang dilaksanakan terhadap jumlah jumlah fasilitasi pengadaan tanah yang seharusnya dilaksanakan, dinyatakan dalam persentase
				2 Tingkat pelaksanaan fasilitasi pengaduan sengketa tanah	Dinas Tata Kota	Perbandingan antara jumlah pengaduan sengketa yang difasilitasi terhadap jumlah pengaduan sengketa yang dilaporkan, dinyatakan dalam persentase
				3 Tingkat ketersediaan sistem informasi tanah milik pemda	Dinas Tata Kota	Perbandingan antarajumlah dokumen sistem informasi tanah milik Pemda yang tersedia terhadap jumlah dokumen sistem informasi tanah milik Pemda yang harus disediakan, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	1	2	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah	4 Persentase Penduduk ber-KTP	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kecamatan	Perbandingan antara Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP yang sudah mempunyai KTP terhadap Jumlah penduduk yang wajib ber-KTP, dinyatakan dalam persentase
				5 Persentase Keluarga mempunyai Kartu Keluarga	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Perbandingan antara Jumlah keluarga yang sudah mempunyai Kartu Keluarga terhadap Jumlah Keluarga, dinyatakan dalam persentase
				6 Persentase Bayi Ber-Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Perbandingan antara Jumlah bayi yang sudah mempunyai Akta Kelahiran terhadap Jumlah bayi, dinyatakan dalam persentase
				7 Persentase Penduduk meninggal dunia Ber-Akta Kematian	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Perbandingan antara Jumlah penduduk meninggal dunia yang sudah mempunyai Akta Kematian terhadap Jumlah penduduk yang meninggal dunia, dinyatakan dalam persentase
				8 Persentase Pasangan Suami-Isteri Ber-Akta Nikah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Perbandingan antara Jumlah pasangan suami-isteri yang sudah mempunyai Akta Nikah terhadap Jumlah pasangan suami-isteri, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	1	3	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Kepemerintahan dan Keadministrasian Umum, serta Kesejahteraan Masyarakat, yang Responsif, Koordinatif, Integratif, Sederhana, dan Sinergis	9 Tingkat penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Sekretariat Daerah	Perbandingan antara Banyaknya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang sudah tertata sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku terhadap Banyaknya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dinyatakan dalam persentase
				10 Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian SKPD	Sekretariat Daerah	Perbandingan antara Banyaknya lembaga/organisasi SKPD yang sudah lengkap dan tertata sesuai peraturan perundangan yang berlaku terhadap Banyaknya seluruh lembaga/organisasi SKPD, dinyatakan dalam persentase
				11 Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Sekretariat Daerah	Perbandingan antara Banyaknya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang dilaksanakan terhadap Banyaknya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yang seharusnya dilaksanakan, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				12 Tingkat kesesuaian formasi jabatan SKPD	Sekretariat Daerah	Perbandingan antara Banyaknya formasi jabatan SKPD yang sudah sesuai beban kerja dan tupoksi terhadap Banyaknya formasi jabatan SKPD yang tersedia, dinyatakan dalam persentase
1	1	4	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel	13 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD	Semua SKPD	Perbandingan antara Banyaknya laporan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia terhadap Banyaknya dokumen dan sistem pengelolaan anggaran, belanja dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tersedia, dinyatakan dalam persentase
				14 Tingkat ketersediaan dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	Perbandingan antara Banyaknya dokumen dan sistem pengelolaan anggaran, belanja dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang tersedia terhadap Banyaknya dokumen dan sistem pengelolaan anggaran, belanja dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
				15 Tingkat ketersediaan dokumen dan sistem pengelolaan aset	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	Perbandingan antara Banyaknya dokumen dan sistem pengelolaan aset daerah yang tersedia terhadap Banyaknya dokumen dan sistem pengelolaan aset daerah yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				16 Tingkat kenaikan pendapatan daerah	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	Perbandingan antara Jumlah kenaikan penerimaan pendapatan daerah per tahun terhadap Jumlah penerimaan pendapatan daerah tahun sebelumnya, dinyatakan dalam persentase
1	1	5	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pengawasan Pembangunan Daerah	17 Tingkat ketersediaan laporan hasil pemeriksaan	Inspektorat	Perbandingan antara Banyaknya laporan hasil pemeriksaan komprehensif, riksus, Riktu, dan evaluasi yang tersedia terhadap Banyaknya laporan hasil pemeriksaan komprehensif, riksus, Riktu, dan evaluasi yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
				18 Tingkat tindak lanjut laporan hasil ekspose temuan hasil pengawasan	Inspektorat	Perbandingan antara Banyaknya Tindak Lanjut Laporan Hasil ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun yang tersedia terhadap Banyaknya Tindak Lanjut Laporan Hasil ekspose temuan hasil pengawasan yang telah disusun yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				19 Tingkat tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Inspektorat	Perbandingan antara Banyaknya tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja terhadap Banyaknya tenaga pemeriksa yang seharusnya menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja, dinyatakan dalam persentase
				20 Tingkat ketersediaan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan	Inspektorat	Perbandingan antara Banyaknya kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan yang tersedia terhadap Banyaknya aturan/regulasi tentang sistem dan prosedur pengawasan yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
1	1	6	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Kepegawaian Daerah	21 Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Perbandingan antara Banyaknya Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan terhadap Banyaknya Pelayanan Administrasi kepegawaian yang seharusnya dilaksanakan, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				22 Tingkat ketersediaan pelayanan Pemensiunan Pegawai	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Perbandingan antara Banyaknya pelayanan pemensiunan pegawai yang dilaksanakan terhadap Banyaknya satuan pelayanan pemensiunan pegawai yang seharusnya dilaksanakan, dinyatakan dalam persentase
1	1	7	Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional	23 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah	Semua SKPD	Perbandingan antara Banyaknya aparatur pemerintah daerah yang sanggup mematuhi peraturan yang berlaku terhadap Banyaknya aparatur pemerintah daerah, dinyatakan dalam persentase
				24 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah	Semua SKPD	Perbandingan antara Banyaknya peralatan dan perlengkapan terkait kedisiplinan aparatur yang tersedia terhadap Banyaknya peralatan dan perlengkapan terkait kedisiplinan aparatur yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
				25 Tingkat Penurunan Indisipliner Pegawai	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Perbandingan antara Jumlah aparatur indisipliner terhadap Jumlah aparatur kota Tangerang, dinyatakan dalam persentase
				26 Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Perbandingan antara Jumlah pejabat yang mengikuti diklat penjurangan struktural terhadap Banyaknya pejabat struktural, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		27 Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat fungsional	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Perbandingan antara Banyaknya pejabat fungsional yang mengikuti diklat penjurangan struktural terhadap Banyaknya pejabat fungsional, dinyatakan dalam persentase
		28 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah	Semua SKPD	Perbandingan antara Banyaknya aparatur pemerintah daerah yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/operasional terkait dengan tugasnya terhadap Banyaknya aparatur pemerintah daerah yang seharusnya mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/operasional terkait dengan tugasnya, dinyatakan dalam persentase
		29 Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional beserta sarana pendukungnya	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Perbandingan antara Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional yang dilayani terhadap Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	1	8	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pemenuhan peralatan dan perlengkapan keadministrasian perkantoran	30 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran	Semua SKPD	Perbandingan antara Banyaknya pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang tersedia terhadap Banyaknya pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
				31 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran	Semua SKPD	Perbandingan antara Banyaknya pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang tersedia terhadap Banyaknya pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
1	1	9	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan kemitraan dan kerjasama yang proporsional dan profesional antara Eksekutif dengan Legislatif untuk menghasilkan Peraturan Daerah	32 Tingkat Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perbandingan antara Banyaknya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD yang difasilitasi terhadap Banyaknya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD yang seharusnya difasilitasi, dinyatakan dalam persentase
				33 Tingkat Fasilitasi Pembahasan dan Persetujuan Raperda	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perbandingan antara Banyaknya Kegiatan Pembahasan dan Persetujuan Raperda yang difasilitasi terhadap Banyaknya Kegiatan Pembahasan dan Persetujuan Raperda yang seharusnya difasilitasi, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	1	10	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Data/ Informasi Pembangunan Daerah	34 Rata-rata tingkat ketersediaan data/informasi statistik hasil pembangunan daerah	Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik	Perbandingan antara Total prosentase tingkat ketersediaan jenis data/informasi statistik hasil pembangunan daerah terhadap Banyaknya tingkat ketersediaan jenis data/informasi statistik hasil pembangunan daerah, dinyatakan dalam persentase
1	1	11	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan berbagai kajian dan penelitian statistik pembangunan daerah	35 Rata-rata tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan strategis	Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik	Perbandingan antara Total prosentase tingkat ketersediaan jenis kajian, penelitian, dan pengembangan strategis terhadap Banyaknya tingkat ketersediaan jenis kajian, penelitian, dan pengembangan strategis, dinyatakan dalam persentase
1	1	12	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Kearsipan Daerah	36 Tingkat ketersediaan sistem dan pedoman penyelenggaraan kearsipan yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu	Kantor Arsip Daerah	Perbandingan antara Jumlah sistem dan pedoman penyelenggaraan kearsipan yang ada terhadap Jumlah sistem dan pedoman penyelenggaraan kearsipan yang seharusnya ada, dinyatakan dalam persentase
				37 Tingkat ketersediaan arsip statis, bernilai guna, dan arsip elektronik	Kantor Arsip Daerah	Perbandingan antara Jumlah arsip yang dinilai kembali terhadap Jumlah arsip bernilai guna yang seharusnya ada, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				38 Tingkat pengelolaan arsip baku pada SKPD	Kantor Arsip Daerah	Perbandingan antara Jumlah SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku terhadap Jumlah SKPD, dinyatakan dalam persentase
				39 Tingkat pemeliharaan arsip dan sarana prasarana pendukungnya	Kantor Arsip Daerah	Jumlah kegiatan pemeliharaan arsip dan sarana prasarana yang dilaksanakan
				40 Persentase terpenuhinya kebutuhan informasi kearsipan	Kantor Arsip Daerah	Perbandingan antara Jumlah pemenuhan informasi kearsipan yang dibutuhkan terhadap Jumlah informasi kearsipan yang dibutuhkan, dinyatakan dalam persentase
				41 Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas	Kantor Arsip Daerah	Perbandingan antara Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang berkualitas terhadap Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang dilaksanakan, dinyatakan dalam persentase
1	1	13	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Daerah	42 Tingkat ketersediaan sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD	Dinas Informasi dan Komunikasi	Perbandingan antara Banyaknya sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD yang tersedia terhadap Banyaknya sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				43 Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Dinas Informasi dan Komunikasi	Perbandingan antara Banyaknya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi yang dilakukan terhadap Banyaknya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi yang seharusnya dilakukan, dinyatakan dalam persentase
				44 Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa	Dinas Informasi dan Komunikasi	Perbandingan antara Banyaknya kerjasama informasi dan media massa yang dilakukan terhadap Banyaknya kerjasama informasi dan media massa yang seharusnya dilakukan, dinyatakan dalam persentase
1	2	1	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintahan daerah secara profesional, cepat, tepat, dan akurat, dengan berbasis pada teknologi informasi yang efektif dan efisien	45 Tingkat Pelayanan Publik yang menggunakan media informasi berbasis Informasi Teknologi	Dinas Informasi dan Komunikasi	Perbandingan antara Banyaknya pelayanan kepada publik/masy. yang sudah menggunakan media informasi berbasis Informasi teknologi terhadap Banyaknya pelayanan kepada publik/masyarakat, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
1	2	2	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi, terstandarisasi, serta memadai (berkemampuan/berkapasitas tinggi, cepat, mudah diakses, praktis, dan aman)	46 Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dinas Informasi dan Komunikasi	Perbandingan antara Banyaknya Aplikasi Sistem Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah diintegrasikan terhadap Banyaknya Aplikasi Sistem Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tersedia, dinyatakan dalam persentase
				47 Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Dinas Informasi dan Komunikasi	Perbandingan antara Banyaknya Aplikasi Sistem Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sudah Dinas Pertaniandarisasi terhadap Banyaknya Aplikasi Sistem Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tersedia, dinyatakan dalam persentase
Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi						
2	1	1	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan Koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal	48 Persentase UMKM Aktif	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Perbandingan antara Banyaknya UMKM yang aktif terhadap Banyaknya seluruh UMKM, dinyatakan dalam persentase
				49 Persentase Koperasi Aktif	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Perbandingan antara Banyaknya koperasi yang aktif terhadap Banyaknya seluruh koperasi, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				50 Tingkat Pertumbuhan UMKM Aktif	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Perbandingan antara (Banyaknya UMKM aktif pada tahun ke-n) - (Banyaknya UMKM aktif pada tahun ke-(n-1) terhadap Banyaknya UMKM aktif pada tahun ke-(n-1), dinyatakan dalam persentase
				51 Tingkat Pertumbuhan Koperasi Aktif	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Perbandingan antara (Banyaknya koperasi aktif pada tahun ke-n - (Banyaknya koperasi aktif pada tahun ke-(n-1) terhadap Banyaknya koperasi aktif pada tahun ke-(n-1), dinyatakan dalam persentase
2	1	2	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Investasi Daerah yang transparan serta didukung oleh iklim investasi yang kondusif	52 Tingkat pertumbuhan investasi daerah	Sekretariat Daerah	Perbandingan antara (Besaran investasi daerah pada tahun ke-n) - (Besaran investasi daerah pada tahun ke-(n-1)) terhadap Besaran investasi daerah pada tahun ke-(n-1), dinyatakan dalam persentase
				53 Tingkat pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan iinvestasi	Sekretariat Daerah	Perbandingan antara Banyaknya fasilitasi kerjasama kemitraan investasi yang dilakukan dalam setahun
				54 Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah	Sekretariat Daerah	Perbandingan antara Banyaknya promosi peluang investasi daerah yang diselenggarakan dalam setahun

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		55 Tingkat ketersediaan Sistem Informasi Pelayanan Investasi Daerah	Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Perbandingan antara Banyaknya Sistem Informasi Pelayanan Investasi Daerah yang tersedia terhadap Banyaknya Sistem Informasi Pelayanan Investasi Daerah yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
		56 Tingkat Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Perbandingan antara Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan terhadap Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diajukan setelah dinyatakan persyaratan lengkap, dinyatakan dalam persentase
		57 Persentase Bangunan yang mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Perbandingan antara Jumlah bangunan yang mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap Jumlah seluruh bangunan , dinyatakan dalam persentase
		58 Tingkat pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Perbandingan antara Banyaknya jenis Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK) yang tersedia, terpublikasi, dan terbaharui terhadap 7 (tujuh) jenis Informasi Pembina Jasa Konstruksi, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				59 Tingkat pelayanan waktu pengurusan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Perbandingan antara Jumlah permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap terhadap Jumlah permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang persyaratan dinyatakan lengkap, dinyatakan dalam persentase
2	1	3	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi, Kewaspadaan, dan Kemasyarakatan	60 Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita	Dinas Pertanian	(Ketersediaan Pangan/Kapita/Hari) x (Kandungan kalori) x (Bagian yang dapat dimakan (BDD)) dibagi 100, dinyatakan dalam persentase
				61 Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita	Dinas Pertanian	(Ketersediaan pangan/Kapita/Hari) x (Kandungan protein) x (Bagian yang dapat dimakan (BDD)) dibagi 100, dinyatakan dalam persentase
				62 Tingkat Penguatan Cadangan Pangan Daerah	Dinas Pertanian	Jumlah Cadangan Pangan Daerah (ton)
				63 Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	Sekretariat Daerah	{Persentase ketersediaan informasi berdasarkan komoditas (K1) + Persentase ketersediaan informasi berdasarkan lokasi (K2) + Persentase ketersediaan informasi berdasarkan waktu (K3)}
				64 Tingkat Stabilitas Harga Pangan	Sekretariat Daerah	Perbandingan antara Jumlah seluruh harga pangan untuk semua komoditas terhadap Banyaknya komoditas, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		65 Tingkat Stabilitas Pasokan Pangan	Sekretariat Daerah	Perbandingan antara Jumlah seluruh pasokan pangan untuk semua komoditas terhadap Banyaknya komoditas, dinyatakan dalam persentase
		66 Capaian Peningkatan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Sekretariat Daerah	Perbandingan antara Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) terhadap Besaran bobot masing-masing kelompok, dinyatakan dalam persentase
		67 Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah	Sekretariat Daerah	Perbandingan antara Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku terhadap Jumlah total sampel pangan yang diambil di pedagang pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan, dinyatakan dalam persentase
		68 Tingkat Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah	Sekretariat Daerah	Perbandingan antara Banyaknya wilayah rawan pangan yang ditangani terhadap Banyaknya wilayah rawan pangan yang seharusnya ditangani, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
2	1	4	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan agribisnis serta budidaya pertanian dan peternakan yang berorientasi pada intensifikasi pertanian	69 Tingkat Produktivitas Pertanian	Dinas Pertanian	Perbandingan antara (Besaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun ke-n) - (Besaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun ke-(n-1) terhadap Besaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun ke-(n-1), dinyatakan dalam persentase
				70 Tingkat produktivitas peternakan	Dinas Pertanian	Perbandingan antara Nilai produktivitas ternak sasaran dalam 1 (satu) tahun terhadap Total produktivitas ternak dalam 5 (lima) tahun, dinyatakan dalam persentase
				71 Tingkat pemasaran hasil produksi pertanian	Dinas Pertanian	Perbandingan antara Kenaikan hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura yang dipasarkan terhadap Seluruh hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura tahun (n-1), dinyatakan dalam persentase
				72 Tingkat pemasaran hasil produksi ternak sapi potong di wilayah Kota Tangerang	Dinas Pertanian	Perbandingan antara Jumlah hasil produksi peternakan yang dipasarkan di wilayah Kota Tangerang terhadap Jumlah hasil produksi peternakan yang dipasarkan, dinyatakan dalam persentase
				73 Angka prevalensi penyakit zoonosis	Dinas Pertanian	Jumlah prevalensi pada setiap lokasi kejadian

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
2	1	5	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Kepariwisata Daerah	74	Tingkat pemasaran obyek wisata daerah	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Perbandingan antara Banyaknya obyek wisata daerah yang dipasarkan terhadap Banyaknya obyek wisata daerah yang seharusnya dipasarkan, dinyatakan dalam persentase
				75	Tingkat kenaikan kunjungan wisatawan ke obyek wisata daerah	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Perbandingan antara (Banyaknya wisatawan yang berkunjung pada tahun ke-(n)) - (Banyaknya wisatawan yang berkunjung pada tahun ke-(n-1)) terhadap Banyaknya wisatawan yang berkunjung pada tahun ke-(n-1), dinyatakan dalam persentase
				76	Tingkat perkembangan destinasi pariwisata daerah	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Perbandingan antara Banyaknya obyek wisata daerah yang menjadi unggulan terhadap Banyaknya seluruh obyek wisata daerah, dinyatakan dalam persentase
				77	Tingkat perkembangan Jenis kelas dan jumlah Hotel	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Perbandingan antara Banyaknya hotel di daerah yang menjadi tempat penginapan wisatawan terhadap Banyaknya seluruh hotel di daerah, dinyatakan dalam persentase
2	1	6	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan intensifikasi budidaya perikanan darat	78	Persentase kenaikan produksi ikan	Dinas Pertanian	Perbandingan antara Jumlah produksi ikan per tahun terhadap Total produksi ikan selama 5 (lima) tahun, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				79 Cakupan bina kelompok peternak ikan	Dinas Pertanian	Perbandingan antara Banyaknya kelompok peternak ikan yang dibina terhadap Banyaknya kelompok peternak ikan yang seharusnya dibina, dinyatakan dalam persentase
				80 Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	Dinas Pertanian	Perbandingan antara Banyaknya produksi perikanan yang dikelola dan dipasarkan terhadap Banyaknya produksi perikanan yang seharusnya dikelola dan dipasarkan, dinyatakan dalam persentase
2	1	7	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perdagangan Daerah dan peningkatan perlindungan konsumen	81 Tingkat pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Perbandingan antara Banyaknya produksi perikanan yang dikelola dan dipasarkan terhadap Banyaknya produksi perikanan yang seharusnya dikelola dan dipasarkan, dinyatakan dalam persentase
				82 Tingkat perlindungan konsumen	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Perbandingan antara Banyaknya pasar/toko modern, pasar tradisional yang diawasi terhadap Banyaknya toko/pasar modern, pasar tradisional yang seharusnya diawasi, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				83 Tingkat pembinaan perdagangan dalam negeri	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Perbandingan antara Banyaknya pasar/toko modern dan tradisional yang dibina terhadap Banyaknya pasar/toko modern dan tradisional yang seharusnya dibina, dinyatakan dalam persentase
2	1	8	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perindustrian Daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah	84 Persentase industri yang memiliki Gugus Kendali Mutu (Pengukuran Standarisasi, Pengujian, dan Kualitas)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Perbandingan antara Banyaknya industri yang mengikuti pelatihan GKM (Pengukuran Standarisasi, Pengujian, dan Kualitas) terhadap Banyaknya seluruh industri Menengah dan Besar, dinyatakan dalam persentase
				85 Persentase IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Perbandingan antara Banyaknya IKM memiliki Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal terhadap Banyaknya seluruh IKM, dinyatakan dalam persentase
				86 Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Perbandingan antara Banyaknya industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi terhadap Banyaknya seluruh industri, dinyatakan dalam persentase
				87 Tingkat Pertumbuhan Industri di Daerah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Perbandingan antara (Banyaknya industri yang ada di daerah pada tahun ke-n) - (Banyaknya industri yang ada di daerah pada tahun ke-(n-1) terhadap Banyaknya industri yang ada di daerah pada tahun ke-(n-1), dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
Misi 3: Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi						
3	1	1	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pendidikan Daerah yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, dan berbasis kompetensi, serta berorientasi pada kebutuhan kerja	88 Angka Putus Sekolah SD/MI	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Jumlah siswa Putus Sekolah Pada Tingkat & Jenjang SD/MI terhadap Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama & Jenjang SD/MI Pada Tahun Ajaran Sebelumnya, dinyatakan dalam persentase
				89 Angka Putus Sekolah SMP/MTs	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Jumlah siswa Putus Sekolah Pada Tingkat & Jenjang SMP/MTs terhadap Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama & Jenjang SMP/MTS Pada Tahun Ajaran Sebelumnya, dinyatakan dalam persentase
				90 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Jumlah siswa Putus Sekolah Pada Tingkat & Jenjang SMA/MA/SMK terhadap Jumlah Siswa Pada Tingkat Yang Sama & Jenjang SMA/MA/SMK Pada Tahun Ajaran Sebelumnya, dinyatakan dalam persentase
				91 Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Jumlah penduduk usia > 15 tahun yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari terhadap Jumlah penduduk usia > 15 tahun, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		92 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Jumlah siswa baru pada jenjang SMP/MTs terhadap Jumlah siswa SD/MI yang baru lulus, dinyatakan dalam persentase
		93 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Jumlah siswa baru pada jenjang SMA/SMK/MA terhadap Jumlah siswa SMP/MTs yang baru lulus, dinyatakan dalam persentase
		94 Angka Kelulusan Siswa SD/MI	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Jumlah siswa SD/MI jenjang akhir yang lulus terhadap Jumlah siswa SD/MI jenjang akhir, dinyatakan dalam persentase
		95 Angka Kelulusan Siswa SMP/MTs	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Jumlah siswa SMP/MTs jenjang akhir yang lulus terhadap Jumlah siswa SMP/MTs jenjang akhir, dinyatakan dalam persentase
		96 Angka Kelulusan Siswa SMA/MA/SMK	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Jumlah siswa SMA/MA/SMK jenjang akhir yang lulus terhadap Jumlah siswa SMA/MA/SMK pada jenjang akhir, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
3	1	2	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Pelayanan dan Akses Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	97 Cakupan Kelurahan Siaga Aktif	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Jumlah Kelurahan Siaga Aktif terhadap Jumlah Kelurahan Siaga yang dibentuk, dinyatakan dalam persentase
				98 Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Banyaknya rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terhadap Banyaknyaseluruh rumah tangga, dinyatakan dalam persentase
				99 Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Banyaknya murid SD dan setingkat yg diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih terhadap Banyaknya seluruh murid SD dan setingkat, dinyatakan dalam persentase
				100 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kota Tangerang	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Jumlah Kunjungan Pasien Masyarakat Kota Tangerang di Sarana Kesehatan Masyarakat di Sarana Kesehatan Strata 1 terhadap Jumlah Masyarakat Kota Tangerang yang mendapat pelayanan, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		101 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Kota Tangerang	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Jumlah Kunjungan Pasien Masyarakat Kota Tangerang di Sarana Kesehatan Masyarakat di Sarana Kesehatan Strata 2 (RS) terhadap Jumlah Masyarakat Kota Tangerang yang mendapat rujukan di sarana kesehatan strata 2, dinyatakan dalam persentase
		102 Cakupan pelayanan JKN (BPJS)	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Jumlah peserta JKN yang berobat ke strata 1 terhadap Jumlah peserta JKN yang berkunjung ke strata 1, dinyatakan dalam persentase
		103 Presentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poliklinik	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Banyaknya paket obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poliklinik yang tersedia terhadap Banyaknya kebutuhan paket obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, dan Poliklinik yang dibutuhkan, dinyatakan dalam persentase
		104 Presentase Sarana Obat dan bahan-bahan berbahaya yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Jumlah sarana obat dan bahan berbahaya yang memenuhi syarat terhadap Jumlah total sarana obat dan bahan berbahaya yang diperiksa/dibina, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				105 Presentase sarana kesehatan yang memenuhi syarat	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Jumlah sarana kesehatan yang memenuhi syarat terhadap Jumlah sarana kesehatan (rumah sakit, klinik, praktek dokter, praktek bidan) yang dibina, dinyatakan dalam persentase
				106 Rasio dokter per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Jumlah dokter yang tersedia terhadap Jumlah penduduk, dinyatakan dalam per seribu
				107 Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Jumlah tenaga medis yang tersedia terhadap Jumlah penduduk, dinyatakan dalam per seribu
3	1	3	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya pemberdayaan dan perlindungan anak yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga	108 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu terhadap Banyaknya laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		109 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Banyaknya korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS terhadap Banyaknya seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS, dinyatakan dalam persentase
		110 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos terhadap Banyaknya korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos, dinyatakan dalam persentase
		111 Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan Banyaknya korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani terhadap Banyaknya korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		112 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundangundangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap Banyaknya perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan, dinyatakan dalam persentase
		113 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya korban yang mendapat layanan bantuan hukum terhadap Banyaknya korban yang membutuhkan bantuan hukum, dinyatakan dalam persentase
		114 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Dinas Sosial	Perbandingan antara Banyaknya perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan terhadap Banyaknya perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di Unit Pelayanan Terpadu (UPT), dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				115 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya terhadap Banyaknya korban yang membutuhkan reintegrasi sosial, dinyatakan dalam persentase
				116 Persentase focal point SKPD yang memiliki aktifitas di dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya focal point SKPD aktif terhadap Banyaknya seluruh SKPD, dinyatakan dalam persentase
				117 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya pekerja perempuan di lembaga pemerintahan daerah terhadap Banyaknya seluruh pekerja perempuan, dinyatakan dalam persentase
				118 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya pekerja perempuan di lembaga swasta terhadap Banyaknya seluruh pekerja perempuan, dinyatakan dalam persentase
3	1	4	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera	119 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya < 20 tahun	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya < 20 tahun terhadap Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya 15-49 tahun, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		120 Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif terhadap Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang usianya 15-49 tahun, dinyatakan dalam persentase
		121 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi terhadap Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang usianya 15-49 tahun, dinyatakan dalam persentase
		122 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB terhadap Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) anggota BKB, dinyatakan dalam persentase
		123 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB terhadap Banyaknya seluruh Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		124 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/ Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap kelurahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya seluruh Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) terhadap Banyaknya seluruh kelurahan, dinyatakan dalam persentase
		125 Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap Kelurahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) terhadap Banyaknya seluruh kelurahan, dinyatakan dalam persentase
		126 Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di daerah	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara (Seluruh kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk masyarakat) - (Penyediaan alat dan obat kontrasepsi oleh pemerintah pusat) - (Penyediaan alat dan obat kontrasepsi oleh swasta) terhadap Seluruh kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk masyarakat, dinyatakan dalam persentase
		127 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Banyaknya kelurahan yang menyediakan rekap data mikro keluarga terhadap Banyaknya seluruh kelurahan, dinyatakan dalam persentase
		128 Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya kecamatan yang memiliki fasilitas konseling remaja terhadap Banyaknya seluruh kelurahan, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				129 Cakupan pelayanan dan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS di setiap kelurahan	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Banyaknya kelurahan yang menyediakan pelayanan dan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS terhadap Banyaknya seluruh kelurahan, dinyatakan dalam persentase
				130 Rasio pelayanan Posyandu Aktif di setiap RW	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya Posyandu Aktif yang melayani masyarakat terhadap Banyaknya seluruh RW, dinyatakan dalam persentase
3	1	5	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial-masyarakat	131 Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Dinas Sosial	Perbandingan antara Banyaknya PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis terhadap Banyaknya PMKS yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis, dinyatakan dalam persentase
				132 Jumlah KUBE yang mendapat Bantuan	Dinas Sosial	Perbandingan antara Banyaknya KUBE yang mendapat bantuan terhadap Banyaknya KUBE yang seharusnya mendapat bantuan, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		133 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	Perbandingan antara Banyaknya WKSBM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos terhadap Banyaknya WKSBM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos, dinyatakan dalam persentase
		134 Persentase (%) penyandang cacat, fisik, mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Dinas Sosial	Perbandingan antara Banyaknya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial terhadap Banyaknya penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial, dinyatakan dalam persentase
		135 Tingkat keikutsertaan eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dinas Sosial	Perbandingan antara Banyaknya eks penyandang penyakit sosial yang mendapat pendidikan dan pelatihan terhadap Banyaknya eks penyandang penyakit sosial yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelatihan , dinyatakan dalam persentase
		136 Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih	Dinas Sosial	Perbandingan antara Banyaknya petugas terlatih yang memiliki kemampuan rehabsos terhadap Banyaknya petugas rehabsos yang ada di Unit Pelayanan Terpadu (UPT), dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
3	1	6	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Ketenagakerjaan Daerah yang berbasis Keahlian serta berorientasi pada penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan	137	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan	Perbandingan antara Banyaknya tenaga kerja yang dilatih terhadap Banyaknya pendaftar pelatihan berbasis kompetensi, dinyatakan dalam persentase
				138	Tingkat besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	Dinas Ketenagakerjaan	Perbandingan antara Banyaknya tenaga kerja yang dilatih terhadap Banyaknya pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan, dinyatakan dalam persentase
				139	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek Aktif	Dinas Ketenagakerjaan	Perbandingan antara Banyaknya pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek aktif terhadap Banyaknya pekerja/buruh, dinyatakan dalam persentase
				140	Tingkat besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	Dinas Ketenagakerjaan	Perbandingan antara Banyaknya kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) terhadap Banyaknya kasus yang dicatatkan, dinyatakan dalam persentase
				141	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Dinas Ketenagakerjaan	Perbandingan antara Banyaknya pencari kerja yang ditempatkan terhadap Banyaknya pencari kerja terdaftar, dinyatakan dalam persentase
				142	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan	Perbandingan antara Banyaknya perusahaan yang diperiksa terhadap Banyaknya perusahaan terdaftar, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				143 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan	Perbandingan antara Banyaknya peralatan yang diuji terhadap Banyaknya peralatan yang terdaftar, dinyatakan dalam persentase
3	1	7	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah	144 Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Perbandingan antara Banyaknya benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan terhadap Banyaknya benda situs dan kawasan cagar yang dimiliki daerah, dinyatakan dalam persentase
				145 Cakupan tempat menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Perbandingan antara Banyaknya tempat yang tersedia untuk menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni terhadap Banyaknya peralatan yang terdaftar, dinyatakan dalam persentase
				146 Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Perbandingan antara Banyaknya peralatan yang diuji terhadap Banyaknya tempat yang seharusnya tersedia untuk menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				147 Cakupan Kajian Seni	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Perbandingan antara Banyaknya jenis kajian seni yang dilakukan terhadap Banyaknya jenis kajian seni yang seharusnya bisa dilakukan, dinyatakan dalam persentase
3	1	8	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Kepemudaan dan Keolahragaan Daerah yang mandiri dan berprestasi	148 Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Perbandingan antara Banyaknya organisasi kepemudaan yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan terhadap Banyaknya seluruh organisasi kepemudaan, dinyatakan dalam persentase
				149 Cakupan fasilitasi kegiatan kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Banyaknya kegiatan kepemudaan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah terhadap Banyaknya kegiatan kepemudaan, dinyatakan dalam persentase
				150 Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Perbandingan antara Banyaknya organisasi Olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi keolahragaan terhadap Banyaknya seluruh organisasi keolahragaan, dinyatakan dalam persentase
				151 Tingkat fasilitasi kegiatan keolahragaan daerah	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Perbandingan antara Banyaknya kegiatan keolahragaan daerah yang difasilitasi oleh pemerintah daerah terhadap Banyaknya kegiatan keolahragaan daerah, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
3	1	9	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikan	152 Cakupan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKP	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Perbandingan antara Banyaknya Konflik antar Golongan Ormas dan OKP yang ditangani terhadap Banyaknya Konflik sosial masyarakat yang terjadi, dinyatakan dalam persentase
				153 Rasio petugas dalam satuan perlindungan masyarakat (Linmas) pada setiap RT	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Perbandingan antara Banyaknya petugas dalam satuan perlindungan masyarakat (Linmas) dalam satu kota terhadap Banyaknya RT atau sebutan lainnya dalam satu kota, dinyatakan dalam persentase
				154 Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Perbandingan antara Banyaknya kegiatan kemitraan dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di wilayah kecamatan terhadap Banyaknya seluruh kecamatan, dinyatakan dalam persentase
				155 Tingkat penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Perbandingan antara Banyaknya sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang Politik yang diselenggarakan terhadap Banyaknya sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang Politik yang seharusnya diselenggarakan, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
3	1	10	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem penegakan peraturan daerah yang manusiawi dan berkeadilan	156 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Perbandingan antara Banyaknya kelompok patroli dalam sehari terhadap Banyaknya seluruh kecamatan, dinyatakan dalam persentase
				157 Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar peraturan daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Perbandingan antara Jumlah Lokasi Pengawasan rawan pelanggaran Perda terhadap Banyaknya Kecamatan, dinyatakan dalam persentase
				158 Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Perbandingan antara Jumlah Operasi Penertiban terhadap Jumlah Banyaknya Operasi Penertiban dalam 5 Tahun, dinyatakan dalam persentase
3	1	11	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Keberdayaan Masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dasar dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat	159 Tingkat pemberdayaan kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara Banyaknya kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang diberdayakan terhadap Banyaknya kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang seharusnya diberdayakan, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				160 Persentase peningkatan lembaga (usaha ekonomi, badan keswadayaan masyarakat, postantek) setiap kelurahan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	Perbandingan antara (Banyaknya lembaga (usaha ekonomi, badan keswadayaan masyarakat, postantek) setiap kelurahan pada tahun ke-n) - (Banyaknya lembaga (usaha ekonomi, badan keswadayaan masyarakat, postantek) setiap kelurahan pada tahun ke-(n-1)) terhadap Banyaknya lembaga (usaha ekonomi, badan keswadayaan masyarakat, postantek) setiap kelurahan pada tahun ke-(n-1), dinyatakan dalam persentase
3	1	12	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat	161 Tingkat kenaikan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	Kantor Perpustakaan Daerah	Perbandingan antara (Banyaknya kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah pada tahun ke-n) - (Banyaknya kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah pada tahun ke-(n-1)) terhadap Banyaknya kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah pada tahun ke-(n-1), dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		162 Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll.	Kantor Perpustakaan Daerah	Perbandingan antara (Banyaknya masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. pada tahun ke-n) - (Banyaknya masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. pada tahun ke-(n-1) terhadap Banyaknya masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. pada tahun ke-(n-1), dinyatakan dalam persentase
		163 Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Kantor Perpustakaan Daerah	Perbandingan antara Banyaknya koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah terhadap Banyaknya koleksi dan jenis buku yang seharusnya tersedia di perpustakaan daerah, dinyatakan dalam persentase
		164 Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital	Kantor Perpustakaan Daerah	Perbandingan antara Banyaknya perpustakaan daerah yang sudah menggunakan teknologi digital terhadap Banyaknya seluruh perpustakaan daerah, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				165 Tingkat kelengkapan sistem layanan perpustakaan daerah	Kantor Perpustakaan Daerah	Perbandingan antara Banyaknya sistem layanan perpustakaan daerah yang tersedia terhadap Banyaknya sistem layanan perpustakaan daerah yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
Misi 4: Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas						
4	1	1	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan yang partisipatif, koordinatif dan integratif, serta berbasis data/informasi dan berorientasi pada sektoral dan kewilayahan	166 Rata-rata tingkat koordinasi/kerjasama perencanaan pembangunan daerah dalam semua aspek pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(Persentase tingkat koordinasi/kerjasama perenc. pemb. daerah bidang sosial-budaya) + (Persentase tingkat koordinasi/kerjasama perenc. pemb. daerah bidang ekonomi) + (Persentase tingkat koordinasi/kerjasama perenc. pemb. daerah bidang pemerintahan) + (Persentase tingkat koordinasi/kerjasama perenc. pemb. daerah bidang sarana-prasarana) dibagi 4

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		167 Tingkat ketersediaan dan implementasi peraturan/regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) serta berbagai aturan pendukungnya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perbandingan antara Banyaknya peraturan/regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) serta berbagai aturan pendukungnya yang tersedia dan terimplementasi terhadap Banyaknya peraturan/regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) serta berbagai aturan pendukungnya yang tersedia, dinyatakan dalam persentase
		168 Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Semua SKPD	Perbandingan antara Banyaknya Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersedia, terkelola, dan terpublikasi terhadap Banyaknya Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersedia, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		169 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Semua SKPD	Perbandingan antara Banyaknya dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung berbagai kajian teknokratis serta dipublikasikan terhadap Banyaknya dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang tersedia, dinyatakan dalam persentase
		170 Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perbandingan antara Banyaknya aparatur perencanaan yang pernah mengikuti berbagai pelatihan terkait perencanaan pembangunan daerah terhadap Banyaknya aparatur perencanaan pembangunan daerah, dinyatakan dalam persentase
		171 Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah	Semua SKPD	Perbandingan antara Banyaknya kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pemb. daerah yang terlibat dalam perenc. pemb. Daerah terhadap Banyaknya kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pemb. Daerah, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
4	1	2	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kependidikan, kebudayaan, dan kepustakaan yang layak dan memadai	172 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana pendidikan PAUD yang layak dan memadai	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Banyaknya kegiatan pengadaan sarana prasarana kebutuhan dasar pendidikan PAUD yang terselenggara terhadap Banyaknya kegiatan pengadaan sarana prasarana kebutuhan dasar pendidikan PAUD yang seharusnya terselenggara, dinyatakan dalam persentase
				173 Tingkat ketersediaan sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Dasar yang layak dan memadai	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Banyaknya Kegiatan pengadaan sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Dasar yang seharusnya terselenggara terhadap Banyaknya Kegiatan pengadaan sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Dasar yang terselenggara, dinyatakan dalam persentase
				174 Tingkat ketersediaan sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Menengah yang layak dan memadai	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Banyaknya Kegiatan pengadaan sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Menengah yang seharusnya terselenggara terhadap Banyaknya Kegiatan pengadaan sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Menengah yang terselenggara, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		175 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SD/MI	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Banyaknya Jumlah Murid Usia Pendidikan SD/MI terhadap Banyaknya Jumlah Penduduk Usia Sekolah SD/MI, dinyatakan dalam persentase
		176 Partisipasi anak Bersekolah (PAB) SMP/MTs	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Banyaknya Jumlah Murid Usia Pendidikan SMP/MTs terhadap Banyaknya Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs, dinyatakan dalam persentase
		177 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMA/MA	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Banyaknya Jumlah Murid Usia Pendidikan SMA/MA terhadap Banyaknya Jumlah Penduduk Usia Sekolah SMA/MA, dinyatakan dalam persentase
		178 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Jumlah Siswa Usia 7-12 Tahun di Jenjang SD/MI/Paket A terhadap Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun, dinyatakan dalam persentase
		179 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Jumlah Siswa Usia 13-15 Tahun di Jenjang SMP/MTs/Paket B terhadap Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		180 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun di Jenjang SMA/SMk/MA/Paket C terhadap Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun, dinyatakan dalam persentase
		181 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan dasar	Dinas Pendidikan	Banyaknya kegiatan penyediaan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan dasar yang terselenggara terhadap Banyaknya kegiatan penyediaan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan dasar yang seharusnya terselenggara, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		182 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan menengah	Dinas Pendidikan	Perbandingan antara Banyaknya kegiatan penyediaan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan menengah yang terselenggara terhadap Banyaknya kegiatan penyediaan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan menengah yang seharusnya terselenggara, dinyatakan dalam persentase
		183 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana kesenian dan kebudayaan daerah	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Perbandingan antara Banyaknya benda situs dan kawasan cagar budaya yang dimiliki daerah dan dilestarikan terhadap Banyaknya benda situs dan kawasan cagar yang dimiliki daerah, dinyatakan dalam persentase
		184 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana perpustakaan daerah	Kantor Perpustakaan Daerah	Perbandingan antara Banyaknya sarana dan prasarana keperpustakaan yang lengkap dan tersedia terhadap Banyaknya sarana dan prasarana keperpustakaan yang seharusnya lengkap dan tersedia, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				185 Cakupan perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan	Kantor Perpustakaan Daerah	Perbandingan antara Banyaknya perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan terhadap Banyaknya semua wilayah kecamatan, dinyatakan dalam persentase
4	1	3	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kesehatan yang layak dan memadai	186 Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya dengan kondisi paket sarana dan prasarana memadai terhadap Jumlah puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya yang ada, dinyatakan dalam persentase
				187 Cakupan Ketersediaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap RW	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Banyaknya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dibangun terhadap Banyaknya seluruh RW, dinyatakan dalam persentase
				188 Cakupan Ketersediaan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di setiap Kecamatan	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Banyaknya Puskesmas yang tersedia terhadap Banyaknya kecamatan, dinyatakan dalam persentase
				189 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Banyaknya puskesmas, poliklinik, pustu terhadap Total jumlah penduduk, dinyatakan dalam per 1000

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				190 Tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai	Rumah Sakit Umum Daerah	Perbandingan antara Banyaknya sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang tersedia secara layak dan memadai terhadap Banyaknya sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang seharusnya tersedia secara layak dan memadai, dinyatakan dalam persentase
				191 Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai	Rumah Sakit Umum Daerah	Perbandingan antara Banyaknya sarana prasarana kesehatan di RS/RSJ/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang terpelihara agar layak dan memadai terhadap Banyaknya sarana prasarana kesehatan di RS/RSJ /Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, dinyatakan dalam persentase
4	1	4	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana-prasarana kebinamargaan, dan keciptakarya daerah yang layak dan memadai	192 Persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang	Dinas Pekerjaan Umum	Perbandingan antara Panjang jalan di wilayah kota dalam kondisi baik dan sedang terhadap Total panjang jalan di wilayah kota, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		193 Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota	Dinas Pekerjaan Umum	Perbandingan antara Panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang tersedia terhadap Panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi yang tersedia, dinyatakan dalam persentase
		194 Persentase cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum	Perbandingan antara Prosentase daerah yang dilayani oleh sistem drainase perkotaan terhadap Prosentase daerah yang seharusnya dilayani oleh sistem drainase perkotaan, dinyatakan dalam persentase
		195 Tingkat pengurangan luas genangan	Dinas Pekerjaan Umum	Perbandingan antara (Luas daerah rawan genangan) - (Jumlah luasan daerah yang masih tergenang (2 jam setelah hujan masih terendam > 30 cm) terhadap Luas daerah rawan genangan, dinyatakan dalam persentase
		196 Tingkat pembangunan turap di wilayah aliran sungai yang rawan longsor lingkup kewenangan kota	Dinas Pekerjaan Umum	Perbandingan antara Banyaknya turap di wilayah aliran sungai yang rawan longsor lingkup kewenangan kota yang dibangun terhadap Banyaknya turap di wilayah aliran sungai yang rawan longsor lingkup kewenangan kota, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan	
4	1	5	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan penyediaan perlengkapan sarana-prasarana transportasi dan kelalulintasan yang layak, memadai, dan terpadu	197	Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah kota yang telah tersedia jaringan jalan	Dinas Perhubungan	Banyaknya jalan di wilayah kota yang terlayani oleh angkutan umum terhadap Banyaknya seluruh jaringan jalan di wilayah kota, dinyatakan dalam persentase
				198	Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani jaringan trayek penghubung antar wilayah	Dinas Perhubungan	Perbandingan antara Banyaknya jaringan trayek antar wilayah yang terlayani oleh angkutan umum terhadap Banyaknya seluruh jaringan trayek antar wilayah, dinyatakan dalam persentase
				199	Tingkat ketersediaan koridor angkutan umum massal	Dinas Perhubungan	Perbandingan antara Jumlah koridor yang tersedia sampai tahun (n) terhadap Jumlah koridor yang seharusnya tersedia sampai tahun (n), dinyatakan dalam persentase
				200	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan angkutan	Dinas Perhubungan	Perbandingan antara Jumlah dokumen perencanaan angkutan yang ada terhadap Jumlah dokumen perencanaan angkutan yang seharusnya ada, dinyatakan dalam persentase
				201	Tingkat Ketersediaan Prasarana Angkutan yang terpelihara	Dinas Perhubungan	Perbandingan antara Jumlah prasarana angkutan yang terpelihara terhadap Jumlah prasarana angkutan yang ada, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		202 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	Dinas Perhubungan	Perbandingan antara Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang ada terhadap Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang seharusnya ada, dinyatakan dalam persentase
		203 Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan di wilayah kota	Dinas Perhubungan	Perbandingan antara Banyaknya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan di wilayah kota terhadap Banyaknya seluruh kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) pada jalan di wilayah kota, dinyatakan dalam persentase
		204 Tingkat ketersediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada berbagai jenis jalan di wilayah kota	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Perbandingan antara Banyaknya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada berbagai jenis jalan di wilayah kota yang tersedia terhadap Banyaknya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada berbagai jenis jalan di wilayah kota yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
		205 Tingkat ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor	Dinas Perhubungan	Perbandingan antara Banyaknya kendaraan bermotor wajib uji terhadap 4.000 (empat ribu) kendaraan, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				206 Tingkat ketersediaan standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kota	Dinas Perhubungan	Perbandingan antara Banyaknya angkutan umum Antar Kota Dalam Daerah (AKDP) yang memenuhi standar keselamatan terhadap Banyaknya angkutan umum Antar Kota Dalam Daerah (AKDP) dalam provinsi, dinyatakan dalam persentase
4	1	6	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian dan Sosial-Kemasyarakatan yang layak dan memadai	207 Persentase panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	Perbandingan antara Banyaknya panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang menyediakan bantuan sarana dan prasarana terhadap Banyaknya semua panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, dinyatakan dalam persentase
				208 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Dinas Sosial	Perbandingan antara Banyaknya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana dan Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Banyaknya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM), dinyatakan dalam persentase
				209 Tingkat Pengembangan Balai Latihan Kerja Daerah	Dinas Ketenagakerjaan	Perbandingan antara Banyaknya Balai Latihan Kerja Daerah yang dikembangkan terhadap Banyaknya Balai Latihan Kerja Daerah yang tersedia, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		210 Cakupan ketersediaan pasar tradisional daerah di setiap kecamatan	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Perbandingan antara Banyaknya Pasar Tradisional Daerah yang tersedia terhadap Banyaknya kecamatan, dinyatakan dalam persentase
		211 Tingkat pembinaan pasar/toko modern dan pasar tradisional daerah	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Perbandingan antara Banyaknya pasar/toko modern dan pasar tradisional daerah yang dibina terhadap Banyaknya pasar/toko modern dan pasar tradisional daerah, dinyatakan dalam persentase
		212 Cakupan gedung olahraga di setiap kecamatan	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	Perbandingan antara Banyaknya gedung olahraga yang tersedia terhadap Banyaknya kecamatan, dinyatakan dalam persentase
		213 Tingkat Ketersediaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Dinas Sosial	Perbandingan antara Banyaknya Panti Asuhan/Panti Jompo yang telah disediakan terhadap Banyaknya Panti Asuhan/Panti Jompo yang seharusnya disediakan, dinyatakan dalam persentase
		214 Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Perbandingan antara Banyaknya Poskamling yang dibangun di setiap RW terhadap Banyaknya seluruh RW, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
4	1	7	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai	215 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Semua SKPD	Perbandingan antara Banyaknya sarana dan prasarana aparatur pemerintahan daerah yang tersedia terhadap Banyaknya sarana dan prasarana aparatur pemerintahan daerah yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
				216 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur	Semua SKPD	Perbandingan antara Banyaknya pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur yang tersedia terhadap Banyaknya pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
4	2	1	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Transportasi serta Manajemen dan Rekayasa Lalulintas yang modern dan terpadu yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan memadai	217 Tingkat ketersediaan pelayanan pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan dengan Sistem ATCS (Area Traffic Control System)	Dinas Perhubungan	Perbandingan antara Banyaknya pelayanan pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan dengan Sistem ATCS yang tersedia terhadap Banyaknya pelayanan pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan dengan Sistem ATCS yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
				218 Tingkat ketersediaan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan	Perbandingan antara Jumlah prasarana penunjang pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan yang terpelihara terhadap Jumlah prasarana penunjang pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan yg ada, dinyatakan dlm persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				219 Tingkat ketersediaan perencanaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan	Dinas Perhubungan	Perbandingan antara Banyaknya dokumen perencanaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan yang tersedia terhadap Banyaknya dokumen perencanaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
Misi 5: Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman						
5	1	1	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan, pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya meminimalan dampak bencana	220 Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	Perbandingan antara Luasan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terhadap Banyaknya luasan wilayah potensi ancaman kebakaran, dinyatakan dalam persentase
				221 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	Dinas Pemadam Kebakaran	Perbandingan antara Banyaknya Aparatur Pemadam Kebakaran memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi terhadap Banyaknya Aparatur Pemadam Kebakaran, dinyatakan dalam persentase
				222 Tingkat penanganan wilayah/lokasi banjir	Dinas Pekerjaan Umum	Perbandingan antara Banyaknya wilayah/lokasi banjir yang ditangani terhadap Banyaknya seluruh wilayah/lokasi banjir, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				223 Tingkat koordinasi penanggulangan bencana	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Perbandingan antara Banyaknya jenis koordinasi penanggulangan bencana yang dilakukan terhadap Banyaknya jenis koordinasi penanggulangan bencana yang seharusnya dilakukan, dinyatakan dalam persentase
				224 Tingkat penanganan korban bencana	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan kecamatan	Perbandingan antara Banyaknya korban bencana yang ditangani terhadap Banyaknya korban bencana yang seharusnya ditangani, dinyatakan dalam persentase
5	1	2	Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman	225 Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Banyaknya kejadian Luar Biasa (KLB) di Kelurahan yang ditangani < 24 jam terhadap Banyaknya Kejadian Luar biasa (KLB) yang terjadi pada wilayah Kelurahan, dinyatakan dalam persentase
				226 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Jumlah Kelurahan UCI terhadap Jumlah Kelurahan yang ada, dinyatakan dalam persentase
				227 Prevalensi balita gizi kurang (BB/U)	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Banyaknya balita gizi kurang berdasarkan indikator berat badan menurut umur terhadap Banyaknya seluruh balita yang ditimbang, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		228 Presentase balita gizi buruk (BB/TB)	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara Banyaknya balita gizi buruk berdasarkan indikator berat badan menurut tinggi badan terhadap Banyaknya seluruh balita, dinyatakan dalam persentase
		229 Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Dinas Kesehatan	Perbandingan antara jumlah Tempat tempat umum yang memenuhi persyaratan di satu wilayah pada tahun terhadap Jumlah Tempat tempat umum yang diperiksa, dinyatakan dalam persentase
		230 Presentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang Memenuhi Syarat kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum	Perbandingan antara Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang Memenuhi Syarat terhadap Jumlah Total Sarana yang dibina / diperiksa, dinyatakan dalam persentase
		231 Persentase penanganan permukiman kumuh perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum	Perbandingan antara Banyaknya permukiman kumuh di wilayah kota yang tertangani terhadap Banyaknya seluruh permukiman kumuh di wilayah kota, dinyatakan dalam persentase
		232 Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi penduduk	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pemadam Kebakaran	Perbandingan antara Jumlah penduduk (per KK) yang sudah menempati rumah yang layak huni dan terjangkau terhadap Total jumlah penduduk per KK, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		233 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Dinas Pemadam Kebakaran	Perbandingan antara Banyaknya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (response time rate) terhadap Banyaknya kasus kebakaran dalam jangkauan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dinyatakan dalam persentase
		234 Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Dinas Pemadam Kebakaran	Perbandingan antara Banyaknya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar yang laik pakai terhadap Banyaknya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran, dinyatakan dalam persentase
		235 Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	Perbandingan antara Banyaknya Poskamling yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan di setiap RT terhadap Banyaknya seluruh Poskamling, dinyatakan dalam persentase
		236 Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) per satuan penduduk	Dinas Pekerjaan Umum	Perbandingan antara Luas area Tempat Pemakaman Umum (TPU) dalam hektare terhadap Jumlah penduduk, dinyatakan dalam persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				237 Tingkat Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	Dinas Pekerjaan Umum	Perbandingan antara Jumlah ketersediaan air baku dari Instansi Pengolah Air terhadap Jumlah kebutuhan air baku berdasarkan target Millenium Development Goals (MDG's), dinyatakan dalam persentase
				238 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Dinas Pekerjaan Umum	Perbandingan antara Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum secara aman terhadap Total jumlah penduduk, dinyatakan dalam persentase
				239 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Dinas Pekerjaan Umum	Perbandingan antara Jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah secara memadai terhadap Total jumlah penduduk, dinyatakan dalam persentase
5	1	3	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Penataan dan Pengelolaan Ruang Wilayah Perkotaan	240 Tingkat penyelenggaraan pengawasan terhadap bangunan gedung (pemerintah dan umum)	Dinas Tata Kota	Perbandingan antara jumlah kegiatan pengawasan bangunan terhadap jumlah kegiatan pengawasan bangunan yang harus dilaksanakan, dinyatakan dalam persentase
				241 Tingkat ketersediaan data mengenai pemanfaatan bangunan gedung	Dinas Tata Kota	Perbandingan antara jumlah dokumen data bangunan gedung yang tersedia terhadap jumlah dokumen data bangunan gedung yang harus tersedia, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		242 Tingkat ketersediaan perangkat kebijakan perencanaan tata ruang kota	Dinas Tata Kota	Perbandingan antara jumlah kebijakan rencana tata ruang yang disusun terhadap jumlah kebijakan rencana tata ruang yang seharusnya disusun, dinyatakan dalam persentase
		243 Persentase Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan	Dinas Tata Kota	Perbandingan antara Luasan RTH Publik/Perkotaan yang tersedia terhadap Luasan RTH Publik/Perkotaan yang seharusnya tersedia, dinyatakan dalam persentase
		244 Tingkat sosialisasi regulasi tentang Rencana Tata Ruang Kota	Dinas Tata Kota	Perbandingan antara jumlah kegiatan dlm rangka sosialisasi thd jumlah kegiatan dlm rangka sosialisasi yg harus dilaksanakan, dinyatakan dalam persentase
		245 Tingkat ketersediaan perangkat kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang kota	Dinas Tata Kota	Perbandingan antara jumlah perwal pengendalian pemanfaatan ruang yang tersedia terhadap jumlah perwal pengendalian pemanfaatan ruang yang harus tersedia, dinyatakan dalam persentase
		246 Tingkat penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang	Dinas Tata Kota	Perbandingan antara tingkat pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yg dilaksanakan terhadap tingkat pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yg harus dilaksanakan, dinyatakan dlm persentase

No.			Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
				247 Tingkat ketersediaan data mengenai pemanfaatan ruang kota	Dinas Tata Kota	Perbandingan antara jumlah peta yang tersedia terhadap jumlah peta yang harus tersedia, dinyatakan dalam persentase
				248 Tingkat ketersediaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan	Dinas Tata Kota	Perbandingan antara jumlah kegiatan penyusunan regulasi penataan bangunan yang dilaksanakan terhadap jumlah kegiatan penyusunan regulasi penataan bangunan yang seharusnya dilaksanakan, dinyatakan dalam persentase
				249 Tingkat ketersediaan, publikasi, dan pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK)	Dinas Tata Kota	Perbandingan antara Jumlah seluruh perkalian antara masing-masing jenis informasi pembina jasa konstruksi dengan masing-masing bobotnya terhadap Luasan Ruang Publik sebagaimana yang direncanakan, dinyatakan dalam persentase
5	1	4	Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pembangunan Ekologis (sosial, lingkungan, ekonomi) yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan	250 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Perbandingan antara Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air terhadap Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		251 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Perbandingan antara Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara terhadap Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah di inventarisasi, dinyatakan dalam persentase
		252 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Perbandingan antara Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti terhadap Jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kota, dinyatakan dalam persentase
		253 Cakupan pemantauan Kualitas air sungai, Air Tanah dan Situ, serta kualitas udara dan kebisingan	Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Perbandingan antara Jumlah titik pemantauan Kualitas air sungai, Air Tanah dan Situ, serta kualitas udara dan kebisingan terhadap Jumlah titik pemantauan Kualitas air sungai, Air Tanah dan Situ, serta kualitas udara dan kebisingan yang ditetapkan, dinyatakan dalam persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	SKPD Penanggungjawab	Keterangan
		254 Persentase pengurangan sampah di perkotaan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Perbandingan antara Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (fasilitasi 3R) terhadap Total jumlah penduduk, dinyatakan dalam persentase
		255 Persentase pengangkutan sampah	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Perbandingan antara Jumlah penduduk yang dilayani kegiatan pengangkutan sampah terhadap Total jumlah penduduk, dinyatakan dalam persentase
		256 Persentase pengoperasian TPA	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	(Koefisien pengoperasian TPA x 40%) + (Koefisien kualitas pengolahan lindi x 40%) + (Koefisien penanganan gas x 20%), dinyatakan dalam persentase
		257 Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Perbandingan antara Banyaknya titik lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan yang terkelola terhadap Total titik lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan, dinyatakan dalam persentase

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) Diisi dengan Nomor Urut Sasaran Renstra SKPD Tahun 2014 – 2018;
- Kolom (2) Diisi dengan Kode Sasaran Renstra SKPD Tahun 2014 – 2018;
- Kolom (3) Diisi dengan Uraian Sasaran Renstra SKPD Tahun 2014 – 2018;
- Kolom (4) Diisi dengan Kode Sasaran RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018;
- Kolom (5) Diisi dengan Uraian Sasaran RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018;
- Kolom (6) Diisi dengan Indikator Kinerja Utama SKPD sesuai dengan Sasaran Renstra SKPD Tahun 2014 – 2018;
- Kolom (7) Diisi dengan Unit SKPD Penanggungjawab, seperti Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang atau Seksi;
- Kolom (8) Diisi dengan sumber indikator kinerja utama SKPD (kolom 6) diambil, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan tentang SPM, MDGs, dan lain-lain.
- Kolom (9) Diisi dengan definisi operasional indikator kinerja utama SKPD (pada kolom 6)

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH